BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Pengertian Implementasi

Menurut Webster's Dictionary dalam (Tachjan, 2006) kata to implement berasal dari bahasa Latin "*implementum"* dari asal kata *"impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill", yaitu mengisi. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Pramono Joko 2020). Menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete".* Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Sedangkan menurut Grindle dalam dalam (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa: "*Implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"* maksudnya: Implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. yakni adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Kemudian dalam buku (Dewi Kusuma, 2022) Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Dari pengertian

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan yang melibatkan beberapa aktor yang menghubungkan antara kebijakan yang dirumuskan dan realisasi kegiatan untuk mencapai tujuan pada target sasaran.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut (Kartawidjaja 2018:) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam suatu sistem politik, dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat sebagai sarana untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat. Alokasi nilai-nilai tersebut dilakukan secara terpaksa berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Definisi tersebut sejalan dengan definisi dari David Easton. (Kusumawati 2019)mendefinisikan kebijakan publik sebagai upaya perintahan dengan keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani permasalahan pelayanan publik dengan semua keprihatiannya, sehingga tidak hanya proses pengambilan keputusan tetapi juga analisisnya.

Woll dalam (Taufiqurokhman, 2015) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga atau pihak ketiga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sementara itu, Pressman dan Widavsky dalam (Taufiqurakhman, 2014:2), menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan hal-hal yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan. Kebijakan publik harus dapat dibedakan dengan bentuk kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil

oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

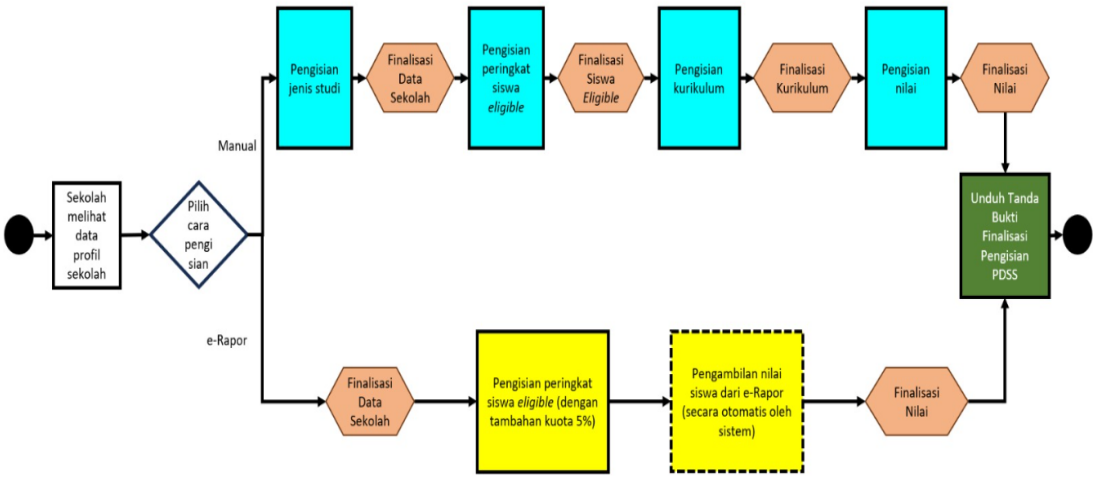
3. Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)

Pangkalan Data Sekolah dan siswa atau yang dikenal dengan PDSS merupakan basis data yang mencatat rekam jejak kinerja suatu sekolah dan nilai rapor siswa. Kemudian data ini dimanfaatkan/digunakan sebagai acuan untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pengisian PDSS merupakan langkah yang paling penting untuk memastikan bahwa siswa yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Berdasarkan situs resmi kemendikbudristek secara umum pengisian PDSS terdapat 4 tahapan yakni finalisasi data sekolah, finalisasi data siswa, finalisasi data kurikulum dan finalisasi data nilai. Dalam prosesnya Sekolah harus memastikan bahwa data sekolah sudah benar di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), kemudian setelah itu pengisian data siswa kelas 12 yang *eligible* ke dalam PDSS dilakukan oleh Kepala Sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah selanjutnya tahapan pengisian PDSS telah selesai jika sekolah berhasil mengunduh bukti finalisasi pengisian PDSS :Secara umum tahapan pengisian PDSS harus Login Akun SNPMB Sekolah, Sekolah Melihat Profil Sekolah, Memilih cara pengisian PDSS, yaitu manual atau E-Rapor, Cetak bukti finalisasi pengisian PDSS.

Mengacu pada Surat Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Nomor 746/a.u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 yakni Dinas Pendidikan Provinsi diharapkan memantau sekolah dalam proses persiapan dan pendaftaran

SNPMB 2025 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir, kemudian Satuan pendidikan diharapkan memperhatikan dan mengingat tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan SNPMB Tahun 2025 dan tepat waktu dalam mengikuti proses pendaftaran, bagi satuan pendidikan yang menggunakan e-rapor, diharapkan untuk segera melakukan sinkronisasi data e-rapor 5 semester siswa kelas 12 ke Dapodik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat proses registrasi akun SNPMB sekolah dan siswa eligible pada PDSS dan satuan pendidikan yang telah melakukan sinkronisasi e-rapor 5 semester dengan Dapodik sampai batas waktu 31 Desember 2024 akan diberikan pilihan untuk mengisi PDSS terintegrasi dengan e rapor dan mendapatkan penambahan kuota siswa eligible peserta SNBP sebesar 5%. Berikut mekanisme pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa:

Gambar 2
Mekanisme Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa



Sumber: Kemendikbudristek, 2025

Penyelenggaraan seleksi masuk mahasiswa baru mengacu pada prinsip yakni; adil yaitu, memberikan kesempatan kepada siswa tanpa membeda bedakan; b) Akuntabel yaitu sesuai prosedur dan kriteria yang jelas; c) fleksibel,

yaitu memberikan kebebasan memilih jalur seleksi, program studi serta Perguruan tinggi yang di inginkan; d) efisien yaitu menggunakan sumber daya secara optimal; e) transparan, yaitu pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan informasi pengumuman hasil mudah diakses; f) larangan konflik kepentingan yakni dengan tetap memperhatikan hasil seleksi dan menghindari Korupsi (Korbaffo dan Dima 2024).

4. Faktor Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan melihat keberhasilannya Grindle mengatakan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dibagi menjadi dua hal yaitu: Dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan dari kebijakan sudah sesuai atau tidak berdasarkan dengan aksi kebijakan yang dilakukan dan Tingkat penerimaan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut serta terjadinya tingkat perubahan. Model implementasi kebijakan top-down dikembangkan oleh George C. Edward III dalam (Agustino 2016). Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel pertama yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka laksanakan. Menurut George C Edward III dalam (Agustino Leo, 2016) terdapat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi merupakan penyaluran komunikasi. Akan tetapi tak jarang ditemui seringkali dalam penyaluran

komunikasi yang terjadi itu adalah penyaluran yang salah pengertian sehingga menyebabkan miskomunikasi hal ini karena proses komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan. Kejelasan merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Hal ini memakan kan bahwa tidak hanya memiliki satu orang akan tetapi mereka juga penting untuk memiliki kompetensi/keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas tugasnya. Dalam implementasi kebijakan salah satu faktor penyebabnya karena staff atau sumber daya manusia (SDM) yang tidak mencukupi ataupun tidak kompeten. Kemudian indikator kedua adalah informasi, yakni informasi yang berhubungan dengan kebijakan dan kepatuhan pelaksana. Selanjutnya indikator ketiga dalam sumber daya yaitu wewenang, yakni harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

c. Disposisi

Pelaksana kebijakan dikatakan efektif jika para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan nya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Pada variabel disposisi terdapat indikator yang bisa mengukur implementasi kebijakan yaitu: Pengangkatan birokrasi, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Kemudian

insentif , Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Dengan memberikan imbalan atau mengenakan biaya yang relevan, hal ini dapat mendorong kepatuhan dan kinerja optimal dalam menjalankan mandat kebijakan

d. Struktur Birokrasi

Pada variable ini, ada 2 (dua) indikator struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni SOP; membuat Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya pada setiap harinya untuk lebih fleksibel dan memudahkan para pelaksana melakukan aktivitas rencana rutin dengan standar yang telah ditetapkan kemudian melaksanakan fragmentasi; ialah untuk membagi tanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing masing untuk menjadikan implementasi lebih efektif dilaksanakan.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi Policy Brief

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman Karya Tulis Ilmiah *Policy Brief* adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. Young & Quinn,(2002) mengemukakan pengertian *policy brief* adalah *a documents that outlines the rationale for choosing a particular policy alternative or course of action in a current policy debate (*dokumen yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tatanan perdebatan kebijakan).

Berdasarkarkan hal diatas, penulis menyimpulkan bahwa policy brief merupakan ringkasan hasil pengamatan/ penelitian terhadap suatu kebijakan yang memuat berbagai alternatif kebijakan. Hal ini dibuat sebagai media kepada pembuat kebijakan untuk mengambil suatu keputusan yang rasional berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan. Policy brief merupakan jembatan antara analisis kebijakan dengan pengambil kebijakan.

Dalam mebuat *policy brief* terdapat beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman Karya Tulis Ilmiah;

a. Fokuskan pada satu masalah kebijakan;
b. Jelaskan tujuan;
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah di pahami;
e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan (*accessible)* oleh target pembaca atay audiens; dan
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman

2. Tujuan *Policy Brief*

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tujuan umum dari *policy brief* ialah untuk mendukung pembuatan keputusan berdasarkan informasu yang relevan pada organisasi-organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/ keputusan. Policy brief memiliki 2 tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Policy brief sebagai media eksplorasi tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih namun *policy brief* juga sebagai media advokasi yang memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu.

3. Sistematika penulisan *policy brief*

Sistematika penulisan policy brief menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 setidaknya memuat komponen komponen sebagai berikut: yakni yang pertama Judul harus menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut, memunculkan minat pembaca, singkat dan jelas mewakili isi substansi tulisan, yang kedua adalah ringkasan eksekutif (Executive summary) Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya yaitu mengapa masalah tersebut perlu/ strategis dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut serta siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut kemudian yang ketiga adalah bagian pendahuluan yaitu Terdiri dari kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan dan mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat, bagian ke empat meliputi deskripsi masalah yaitu spesifik langsung ke inti permasalahan terukur disertai bukti bukti yang memadai *(evidence bassed) dan* analisis (apa, di mana, siapa, mengapa, dampak/efek), selanjutnya yaitu Rekomendasi yakni dalam menuliskan rekomendasi baiknya spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat, terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (Stakeholder) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada, alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/ pemilihan dan ganmbaran singkat alternatif yang di pilih) kemudian Apendiks (jika diperlukan) dan Referensi Utama

C. Penelitian Terdahulu

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu secara kolektif memberikan pemahaman terkait fokus penelitian yang dikaji yakni terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestai (SNBP) sebagai berikut: Pada 2 penelitian ini mengkaji terkait ketidakpastian pdss dan implikasinya terhadap kurikulum 2025 dan dampak sistem SNBP..

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Metode	Hasil
Nabila Aisyah Dkk 2025)	Kualitatif	Penelitian yang dilakukan berjudul "Ketidakpastian PDSS dan Implikasinya Terhadap Kurikulum 2025". Temuan utama mengidentifikasi ketidakpastian sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai kendala serius bagi Kurikulum 2025, mencakup masalah validitas, input, dan pembaruan data yang menghambat akuntabilitas serta pengambilan keputusan berbasis data, termasuk seleksi perguruan tinggi. Keraguan mengenai mekanisme input, validitas, dan pembaruan data menyebabkan kebingungan di kalangan sekolah, guru, dan siswa.
(Rafi Muhammad, 2023)	Kualitatif	Penelitian berjudul Analisis Dampak Sistem Seleksi Penerimaan Nasional Mahasiswa Baru Berdasarkan Prestasi Tahun 2023 dengan Kualifikasi Penjurusan Pendidikan Tinggi Menekankan pentingnya usaha sadar dan terencana dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk penjaminan mutu melalui akreditasi dan

		evaluasi berkala. Penerimaan mahasiswa baru memerlukan kebijakan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap jalur seleksi berbasis prestasi, yang mencerminkan meningkatnya kompetisi di kalangan siswa. Secara keseluruhan,
Gea Josua Dkk	Kualitatif	Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengisian Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh guru di sekolah-sekolah Indonesia, serta memahami dampaknya terhadap peluang siswa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi (SNBP). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, serta mengusulkan sistem pengelolaan data yang lebih efektif dan disiplin guna mencegah keterlambatan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kerangka pikir yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

